

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Adi Putra<sup>1</sup>, Hasim As'ari<sup>2</sup>, Adianto<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Correspondence Author: [Adi.putra7538@grad.unri.ac.id](mailto:Adi.putra7538@grad.unri.ac.id)

Pekanbaru, 28291, Indonesia

### Abstract

*This paper discusses the collaborative governance tourism strategy in developing tourist objects in North Rupal. Potential tourism objects in North Rupal are marine tourism, historical tourism, cultural tourism and nature tourism. In its implementation there are problems such as abrasion, garbage, and accessibility. This study uses a descriptive qualitative method. The research location was conducted in North Rupal. Data collection techniques by observation and in-depth interviews. The data analysis technique uses the opinion of Miles Huberman and Saldana (2014) through stages; data compaction, data presentation (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification). The results of this study are that there is tourism potential in every village in North Rupal Subdistrict. The implementation of collaborative governance tourism is Principled Engagement, Shared Motivation, Capacity for Joint Action. Obstacles in implementing collaborative governance tourism are limited human resources, tourism development coordination is implemented simultaneously.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Tourism Development

### Abstrak

Makalah ini membahas strategi *collaborative governance tourism* dalam pengembangan objek wisata di Rupal Utara. Potensi Objek Wisata di Rupal Utara adalah Wisata bahari, wisata sejarah, wisata budaya dan wisata alam. Pada pelaksanaannya terdapat permasalahan seperti abrasi, sampah, dan aksesibilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Rupal Utara. Teknik pengambilan data dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan pendapat miles Huberman dan saldana (2014) melalui tahapan; pemadatan data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat potensi pariwisata di setiap desa di Kecamatan Rupal Utara. Pelaksanaan *collaborative governance tourism* adalah *Principled Engagement, Shared Motivation* (Motivasi bersama) *Capacity for Join action* (Kapasitas untuk aksi bersama). Kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance tourism* adalah keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi pembangunan pariwisata dilaksanakan secara simultan.

**Kata Kunci:** Pengembangan Pariwisata; Tata Kelola Kolaboratif

## PENDAHULUAN

Pulau Rukat merupakan salah satu wilayah pesisir yang terletak di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Pulau ini menyimpan dan memiliki potensi Daya Tarik Wisata (DTW) sangat potensial dikembangkan, mulai dari wisata buatan, wisata budaya maupun wisata alam. Potensi DTW pulau rukat meliputi Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari dan wisata mangrove. Sedangkan potensi wisata budaya seperti *etnotourism* suku akit mandi safar, perkampungan nelayan dan desa Melayu yang menawarkan kehidupan suku Melayu perairan Rukat. Pembangunan potensi kepariwisataan memerlukan dukungan multi sektor dalam pelaksanaan. Mengingat potensi ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah lebih luas dapat menjadi pengembangan ekonomi alternatif bagi warga.

Dalam konteks kebijakan pembangunan Pulau Rukat Pemerintah Pusat dalam membangun Pulau Rukat sebagai salah satu destinasi wisata andalan di Indonesia seyogyanya didukung oleh kebijakan pembangunan pariwisata di Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.

Penulis melakukan studi dokumen terkait kebijaksanaan arah pembangunan kepariwisataan Pulau Rukat dari analisa dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPARNAS), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Riau (RIPARPROV), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bengkalis (RIPARDA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bengkalis. Dari dokumen tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pulau Rukat merupakan wilayah strategis pembangunan nasional.

Pada dokumen Riparnas Pulau Rukat merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pembangunan terkait daya dukung KSPN telah dilakukan antara lain: 1) aksesibilitas kawasan Pulau Rukat (betonisasi, turap dan pemecah gelombang), 2) Amenitas atau daya dukung (Petunjuk arah, toilet umum, tempat ibadah), 3) Pengembangan Even (Festival mandi safar, Balimau, Bujang Dara dll), 4) Pengembangan DTW (Pembuatan papan nama gapura). Isu kebijakan lain adalah Pulau Rukat merupakan wilayah Rencana Tata Ruang (RTR) Perbatasan. Kawasan ini memiliki fungsi salah satunya sebagai promosi wisata.

Namun realitas yang ditemukan dari riset tahun sebelumnya bahwa derivate kebijakan pembangunan pariwisata yang secara khusus di level provinsi maupun level kabupaten belum muncul. Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan RTRW daerah dalam rangka membangun pariwisata di wilayah pesisir Pulau Rukat. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata yang dilakukan di wilayah pesisir Pulau Rukat belum terwujud maksimal sejak diterbitkan RIPARNAS. Karena pembangunan pariwisata harus didukung dengan kesiapan aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata yang baik.

Puteri, dkk (2022) mengungkapkan bahwa ketiga DTW ini menjadi daya tarik bagi Pulau Rupa apabila mampu dibangun dan dikembangkan secara maksimal. Mereka mengungkap terdapat tiga daya dukung pariwisata belum maksimal dalam pembangunan yaitu; 1) aksesibilitas menuju DTW, 2) Keterbatasan lahan dalam pengembangan. Banyak lahan telah dikuasai swasta, perorangan atau masyarakat, 3) Keterbatasan APBD dialokasikan untuk pengembangan Pulau Rupa. Rheza (2019) mengungkapkan bahwa pembangunan penunjang sektor kepariwisataan belum terlaksana dengan baik diantaranya sebagai berikut: 1) terbatasnya infrastruktur (transportasi, aksesibilitas, fasilitas pendukung lainnya, 2) Belum ada pelabuhan internasional, 3) kunjungan pariwisata rendah.

Pujiono (2019) melakukan riset tentang kolaborasi dalam *Tourism Collaborative Governance* Objek wisata Tanjung Lesung di Provinsi Banten menemukan adanya hubungan timbal balik antara stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata yang optimal. Hubungan tersebut menjadi sangat kompleks karena masing-masing stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda. Melalui kombinasi kekuasaan, kepentingan, dan pengaruh, membentuk cluster stakeholder yang menyebabkan kolaborasi dalam posisi yang tidak seimbang. Beberapa pemangku kepentingan mendominasi pengelolaan dan lainnya hanya sebatas sebagai pendukung bahkan ada yang pasif. Kondisi ini menghambat komunikasi antar pemangku kepentingan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam berkolaborasi. Tata kelola kolaboratif secara konseptual memang ideal, tetapi dalam konteks berbagai tingkat pemangku kepentingan lintas sektor, teori ini perlu dikembangkan lebih lanjut.

Hasil Pra riset dari penulis menemukan data sebagai berikut; 1) Daya tarik wisata pantai lapin bersifat embrional. Daya dukung kepariwisataan belum dibangun secara maksimal, 2) Sumber daya manusia terkait kepariwisataan belum dikembangkan. Khususnya di Rupa Utara belum ada kelompok sadar wisata di setiap desa, 3) Belum ada data kunjungan wisatawan. Namun penulis telah melakukan wawancara pada penggiat pariwisata, menurut mereka tingkat kunjungan pada hari biasa masih rendah. Kunjungan meningkat jika pemerintah daerah mengadakan *event* dilokasi tertentu.

Dari permasalahan diatas perlu penyelesaian secara holistik mengingat pariwisata adalah fenomena sosial dan ekonomi yang tumbuh secara signifikan pada skala global. Konteks pertumbuhan ini berarti tata kelola destinasi muncul sebagai topik penting. Pada tahun 2011, *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) mengemukakan bahwa tata kelola di daerah tujuan wisata merupakan bidang yang perlu mendapat perhatian khusus. Dua tahun kemudian, pada tahun 2013, UNWTO mengusulkan definisi sebagai berikut:

*Tata kelola adalah praktik pemerintahan yang terukur, yang bertujuan untuk mengarahkan sektor pariwisata secara efektif pada berbagai tingkat pemerintahan melalui bentuk koordinasi, kolaborasi dan/atau kerja sama yang efisien, transparan dan tunduk pada akuntabilitas, yang membantu mencapai tujuan kepentingan bersama yang dimiliki bersama oleh jaringan aktor yang terlibat dalam sektor tersebut, untuk mengembangkan solusi dan peluang melalui kesepakatan berdasarkan pengakuan saling ketergantungan dan tanggung jawab bersama (Duran, 2013:14).*

Menurut Emerson dkk. (2011), tata kelola kolaboratif didefinisikan sebagai “struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau ruang publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan publik. tujuan yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.” (Emerson dkk., 2011:2). Definisi ini mencakup kemitraan antara negara, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat.

Fennel (1999) dalam Lokantara & Rafi'I (2017) menerangkan bahwa pariwisata pariwisata dipandang sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan seperti; komponen ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Pariwisata sebagai sebuah sistem tidak dapat dipisahkan dari sistem lainnya terjadi hubungan *interconnectedness* atau saling ketergantungan. Begitu pula yang diungkapkan oleh pitana dan gayatri (2005) bahwa terdapat aktor pariwisata yaitu; masyarakat, swasta dan pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis perlu melakukan strategi kolaborasi dengan berbagai stakeholders. Sebab keterlibatan berbagai stakeholders dalam pembangunan pariwisata di Pulau Rupa Utara akan membantu percepatan perwujudan salah satu destinasi andalan di Indonesia. Konsep kolaborasi yang dilakukan sering dikenal dengan istilah *collaborative governance* yang juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparenkraf) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Permenparenkraf ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *bussiness, government, community, academic, and media* (BGCAM).

Makalah ini mempunyai tujuan untuk yaitu; 1) Bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata di Rupa Utara Kabupaten Bengkalis?, 2) Faktor-Faktor apa yang menghambat *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata di Rupa Utara Kabupaten Bengkalis?. Manfaat penelitian bagi pemerintah daerah adalah dapat menjadi alternatif rujukan pengambilan kebijakan terkait pembangunan kepariwisataan di Pulau Rupa khususnya yang bersinggungan dengan *collaborative governance*.

## METODOLOGI

Lokasi penelitian ini adalah di Pulau Rupa, Kabupaten Bengkalis. Lokasi ini identik dengan wilayah pesisir dan perbatasan antar negara. Selain itu pulau rupa memiliki isu menarik terkait pembangunan kepariwisataan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara utuh (*holistik*) (Gunawan, 2013:79). Penulis memilih informan dengan metode secara purposif (*purposive sampling*). Purposif sampling/Sampel bertujuan adalah metode pengambilan subjek bukan berdasarkan pada strata, random, atau wilayah, tetapi pada tujuan tertentu (Arikunto, 2013:9).

Teknik pengumpulan data yaitu observasi yaitu Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian (Sugiyono, 2006). Selain itu penulis melakukan wawancara mendalam. Metode wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan dengan maksud memperoleh informasi dari objek. wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexy J. Maleong, 2006:186). Teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) dengan kutipan berikut:

*The data analysis technique used refers to the interactive analysis model from Miles, Huberman & Saldaña (Miles et al., 2014), which was quoted from the journal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022), namely The data is analyzed using several steps, namely analyzing the data with three steps: data condensation, presenting data (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification). Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming data.*

Analisis data ini digunakan untuk menjelaskan *collaborative governance* dalam Pengembangan Objek Wisata di Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, potensi kepariwisataan, permasalahan pengembangan kepariwisataan dan kendala yang dialami dalam pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Rupa Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis membahas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait isu-isu *collaborative governance* dalam Pengembangan Objek Wisata di Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, potensi kepariwisataan, permasalahan pengembangan kepariwisataan dan kendala yang dialami dalam pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Rupa Utara.

### Potensi Pembangunan Daya Tarik Wisata Rupat Utara dan Permasalahannya

Rupat Utara Mempunyai potensi destinasi wisata alam dan budaya di masing masing desa. Penulis mengidentifikasi potensi pariwisata beberapa desa di Kecamatan Rupat Utara. Beberapa potensi pembangunan daya tarik wisata seperti Kawasan pariwisata bahari dan pantai (*coastal*), kawasan wisata alam (*nature*), Kawasan wisata budaya (*culture*) dan situs peninggalan sejarah (*heritage*). Berikut adalah potensi wisata menurut desa di Kecamatan Rupat Utara. Syahria dkk, (2018) di kawasan kawasan KKPD Rupat Utara ditemukan sebanyak 12 spesies, kondisi hutan mangrove masih baik dengan populasi sangat padat. Tingkat degradasi tergolong rendah. Potensi tersebut DTW dapat dikembangkan menjadi potensi pariwisata alam.

Penulis membagi potensi daya tari wisata di setiap Desa dengan dengan hasil yaitu; 1) Desa teluk Rhu terdapat wisata bahari pantai pesona, pantai teluk rhu, sedangkan wisata budaya adalah budaya melayu dan kampung nelayan, 2) Desa kadur memiliki potensi budaya melayu dan Klenteng Vidya Sagara, 3) Desa Tanjung Medang mempunyai potensi wisata bahari Pantai Tanjung Medang, budaya Kelenteng Cin Heng Kang dan wisata alam Hutan Mangrove, 4) Desa Tanjung Punak terdapat DTW Pantai Tanjung Lapin, Mandi Safar, Tari Zapin Api, Hutan Mangrove, 5) Titi Akar terdapat DTW Kelenteng Cin Bu Kiong, Etnotourism Suku Akit, Sumur Bertuah, 6) Desa Hutan Ayu terdapat DTW Etnotourism Suku Akit, 7) Suka Damai terdapat DTW Pulau Beting Aceh, 8) Desa Puteri Sembilan terdapat DTW Makam Puteri Sembilan, Pantai Bestari

**Tabel 1.** Potensi Pembangunan Objek Wisata Kecamatan Rupat Utara

No.	Nama Desa	Objek Wisata			
		Bahari	Budaya	Wiata Alam	Heritage
1.	Teluk Rhu	- Pantai Pesona - Pantai Teluk Rhu,	- Budaya Melayu - Kampung Nelayan	- Mangrove	- Menara api/merc usuar
2.	Kadur		- Budaya Melayu - Kelenteng Vidya Sagara		
3.	Tanjung Medang	- Pantai Tanjung Medang	- Kelenteng Cin Heng Kang - Suku AKit	- Hutan Mangrove	
4.	Tanjung Punak	- Pantai Tanjung Lapin	- Mandi Safar - Tari Zapin Api	- Hutan Mangrove	- Sumur bertuah
5.	Titi Akar		- Kelenteng Cin Bu Kiong - Etnotourism Suku Akit		- Sumur Bertuah
6.	Hutan Ayu		- Etnotourism Suku Akit		
7.	Suka Damai	- Pulau Beting			

---

	Aceh			
	- Pulau Babi			
8.	Puteri Sembilan	- Pantai Besatari	- Makam Puteri Sembilan	- Makam Puteri Sembilan
		- Pantai Pasir Putih		

---

Sumber: Hasil Olahan Penulis 2022

Tabel 1 menjelaskan bahwa Data objek wisata Kecamatan Rupal Utara terdapat banyak kendala dan permasalahan yang dialami. Dalam aspek wisata bahari beberapa pantai mengalami abrasi. Abrasi yang terjadi di pulau rupal di beberapa lokasi teluk rhu, putri sembilan, tanjung medang. Ketiga pantai tersebut terdampak abrasi parah dengan laju 2-7 meter per tahun. Pantai tersebut mengalami tersebut berhadapan langsung dengan selat malaka dan mengalami hantaman ombak tinggi pada bulan November-Desember. Upaya penanggulangan abrasi sudah dilakukan sejak tahun 2013 dengan membangun turap pantai dan pemecah gelombang di beberapa lokasi. Namun kuatnya hantaman gelombang laut beberapa titik turap saat ini telah mengalami kerusakan.

Permasalahan lain yang terjadi adalah belum ada pengelolaan sampah, sehingga banyak sampah bertebaran dipantai, dan dijalan. Akses air bersih juga menjadi kendala, beberapa lokasi belum disaluri air bersih. Pendukung lain seperti akses internet ketersediaan listrik yang tidak stabil banyak dikeluhkan wisatawan.

### **Collaborative governance dalam Pengembangan Objek Wisata di Rupal Utara**

Selain fokus kepada penyiapan infrastruktur dalam mendukung pembangunan pariwisata di Pulau Rupal Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis perlu melakukan strategi kolaborasi dengan berbagai stakeholders. Sebab keterlibatan berbagai stakeholders dalam pembangunan pariwisata di Pulau Rupal Utara akan membantu percepatan perwujudan salah satu destinasi andalan di Indonesia. Konsep kolaborasi yang dilakukan sering dikenal dengan istilah collaborative governance yang juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparenkraf) Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Permenpar ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *bussiness, government, community, academic, and media*.

### **Principled Engagemet (Keterlibatan berprinsip)**

Proses kolaborasi terungkap bahwa dalam pengelolaan pariwisata memiliki keterlibatan bersama dari pihak dalam melakukan kerjasama serta kepentingan untuk bergabung dalam kolaborasi. Dalam pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin melibatkan pihak

---

masyarakat dalam hal ini kelompok sadar wisata.

Pemerintah daerah juga melakukan pengawasan, pelatihan, dan mendengarkan berbagai macam kendala yang terjadi dilapangan, agar pokdarwis tersebut bisa mengembangkan dan mengelola dengan baik bagaimana Wisata pantai tanjung lapin bisa jauh lebih baik dari pada wisata yang ada didaerah lainnya. Sikap yang ditunjukkan pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, sudah memberikan kepercayaan kepada pokdarwis agar mereka dapat secara mandiri serta bisa mengelolanya dengan baik.pemerintah sangat perhatian dengan mendatangi tempat usaha pariwisata tersebut sekaligus sebagai pengawasan sedangkan kepada masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat didalam usaha pariwisata dan ikut melibatkan mereka ke dalam program-program yang dilakukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Melakukan sebuah kolaborasi harus memiliki landasan utama yaitu deliberasi (diskusi bersama) karena hal ini dapat menunjang dalam proses kegiatan kolaborasi. Deliberasi dalam suatu proses kolaborasi adalah sebuah diskusi bersama dengan actor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin Kecamatan Rupa Utara

#### **Shared Motivation (Motivasi bersama)**

Dalam sebuah kolaborasi kepercayaan bersama sangat penting karena proses pengelolaan tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi melibatkan pihak lain sehingga dalam pengelolaannya kepercayaan kepada semua pihak harus ada untuk memperlancar kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin. Kepercayaan bersama sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga yang memiliki kepentingan untuk menunjang kelancaran proses kolaborasi yang baik.

Peneliti juga mendapat informasi dari ketua pokdarwis bahwa untuk membangun rasa kepercayaan yang baik perlu dilakukan dengan menjaga komunikasi tetap berjalan baik itu saat mengelola dan mengerjakan destinasi wisata pantai tanjung lapin. Untuk mendorong dan memotivasi kami selalu melakukan evaluasi karena kesalahan yang ada di wisata pantai tanjung lapin ini selalu dibenahi dan diperbaiki selalu agar kedepannya lebih bagus. Untuk mendorong berkembangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola wisata pantai tanjung lapin dapat timbul karena akan berdampak dan bermanfaat seperti misalnya dibidang ekonomi, sosial budaya, serta bermanfaat bagi lingkungan disekitar tempat wisata pantai tanjung lapin. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Shared Motivation (Motivasi Bersama) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah memberikan pelatihan, pengawasan, serta bimbingan agar pokdarwis rupa utara ini dapat mengelola dan mengembangkan wisata pantai tanjung lapin.

Proses terbentuknya rasa saling percaya tidak terlepas dari visi misi yang sama dalam



hal ini untuk berkelanjutan untuk wisata pantai tanjung lapin. Selain itu kepercayaan juga terbentuk dari komunikasi yang baik dan dilakukan secara informal yang berkelanjutan antara seluruh pihak sehingga diharapkan berdampak pada keterbukaan masing-masing pihak yang terlibat dalam memberikan perspektifnya sehingga tujuan yang dicanangkan diawal dapat dicapai untuk mengembangkan wisata pantai tanjung lapin.

Membangun sebuah kepercayaan dan motivasi sangat penting karena kepercayaan antar aktor merupakan poin awal dari proses kolaborasi, sebab proses kolaborasi tidak hanya pada dialog tatap muka tetapi juga membangun kepercayaan antar aktor. Membangun kepercayaan menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antara berbagai aktor baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat agar terbentuknya komitmen untuk menjalankan kolaborasi dalam mengembangkan wisata pantai tanjung lapin.

#### **Capacity for Join action (Kapasitas untuk aksi bersama)**

Dalam membangun pemahaman bersama dengan pihak kelompok sadar wisata hal yang dilakukan dengan melakukan komunikasi serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan juga menghargai tugas masing-masing akan tetapi hal ini tidak berjalan dengan baik dalam pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin karena kelompok sadar wisata di Rupa Utara tidak aktif dan Dinas Pariwisata lebih mengutamakan kelompok sadar wisata yang aktif.

Berkolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin pihak Dinas Pariwisata berupaya membangun pemahaman bersama dengan pihak kelompok sadar wisata untuk menjaga hubungan dengan baik serta kepercayaan antara pihak yang berkolaborasi dengan melakukan komunikasi dan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan akan tetapi ketidakaktifan dari kelompok sadar wisata membuat komunikasi antar keduanya tidak baik sehingga kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin tidak berjalan dengan baik.

#### **Komitmen**

Komitmen dalam pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin berpatokan pada aturan yaitu SK Kepala Dinas Pariwisata namun karena pihak dari kelompok sadar wisata kurang aktif sehingga kerjasama yang dilakukan tidak berjalan dengan baik lagi. Komitmen dalam sebuah kolaborasi penting dan sangat dibutuhkan karena dalam melakukan tindakan harus memiliki komitmen dengan jelas agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan bersama dapat dicapai. Pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin pihak yang melakukan sesuai aturan yaitu SK Kepala Dinas dan berusaha untuk mempertahankan kerjasama agar tidak kendor, namun kedua pihak yang bekerjasama belum menjaga

komitmen yang ada dengan kuat sehingga pada kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata belum berjalan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan teori Balogh karena Komitmen dalam sebuah kolaborasi penting dan sangat dibutuhkan karena dalam melakukan tindakan harus memiliki komitmen dengan jelas agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan bersama dapat dicapai.

### **Kendala pelaksanaan Collaborative governance dalam Pengembangan Objek Wisata di Rupa Utara**

Faktor-faktor penghambat timbul dalam proses implementasi kegiatan rehabilitasi serta proses kolaborasi yang akan dilaksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. *Collaborative Governance* dalam pengembangan objek wisata di Rupa Utara Kabupaten Bengkulu tidak selalu berjalan dengan lancar. Masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi untuk memajukan. Penulis telah memunculkan berbagai macam hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari *collaborative governance* antara lain.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program, oleh sebab itu dalam implementasi suatu program diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas serta yang berkompeten dibidangnya agar proses kegiatan serta kolaborasi dapat diimplementasikan dengan efektif dan juga efisien. Namun pada kenyataannya dalam proses kegiatan Pengembangan objek wisata pantai tanjung lapin di UPT Pengembangan Pariwisata Pulau Rupa masih terkendala dengan sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin yang masih belum mencukupi dan mengakibatkan tidak terlaksana dengan baik seperti yang diungkapkan oleh UPT Pengembangan Pariwisata Pulau Rupa.

Faktor penghambat pertama yaitu sumber daya manusia, peneliti menemukan bahwa kurang adanya kelompok jabatan fungsional yaitu SDM yang profesional dalam pengembangan objek wisata, hanya segelintir pegawai yang basicnya paham akan pengembangan objek wisata yang bekerja menjadi padahal dalam hal ini pentingnya SDM menjadi pendamping kelompok sadar wisata, dimana SDM profesional sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi, pendidikan, pelatihan dan keterampilan atau pengalaman melaksanakan pengembangan pariwisata.

### **Program Pembangunan Antar Lembaga Berjalan Simultan**

Kunci dari pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam aspek pariwisata adalah kerja sama multi sektor. tata kelola kolaboratif didefinisikan sebagai "struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau ruang publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan publik. tujuan yang tidak dapat dicapai

dengan cara lain. Fennel (1999) dalam Lokantara & Rafi'i (2017) menerangkan bahwa pariwisata pariwisata dipandang sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan seperti; komponen ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Pariwisata sebagai sebuah sistem tidak dapat dipisahkan dari sistem lainnya terjadi hubungan interconnectedness atau saling ketergantungan. Begitu pula yang diungkapkan oleh pitana dan gayatri (2005) bahwa terdapat aktor pariwisata yaitu; masyarakat, swasta dan pemerintah.

Pada proses pembanguna objek wiasta Pariwisata di Kecamatan Rupert utara kerja sama yang terjadi baru melibatkan pemerinta daerah melalui UPT Pengelola Pantai lapin dan masyarakat sekitar melalui Pokdarwis. Sektor swasta belum dilakukan penjajakan kerja sama untuk mengurai permasalahan pembangunan Objek Wisata di Kecamatan Rupert Utara. Sehingga pembangunan terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada alur kordinasi yang jelas.

Permasalahan awal telah diungkapkan bahwa tidak sektor transportasi mengalami kendala, namun pada proses pembangunannya tidak melibatkan pengusaha travel atau speet boat. Mengingat banyak wisatawan ke ulau rupert mengeluhkan aspek transportasi. Akomodasi dan ketersediaan air bersih yang menjadi kendala juga tidak ada kerjasama antar lembaga (PDAM) atau lembaga desa untuk membangun jaringan air bersih dikawasan Rupert Utara.

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan terkait potensi pembangunan destinasi wisata, permasalahan, *collaborative governance tourism* dan kendala dalam pelaksanaan.

*Pertama*, Penulis membagi potensi daya tari wisata di setiap Desa dengan dengan hasil yaitu; 1) Desa teluk Rhu terdapat wisata bahari pantai pesona, pantai teluk rhu, sedangkan wisata budaya adalah budaya melayu dan kampung nelayan, 2) Desa kadur memiliki potensi budaya melayu dan Klenteng Vidya Sagara, 3) Desa Tanjung Medang mempunyai potensi wisata bahari Pantai Tanjung Medang, budaya Kelenteng Cin Heng Kang dan wisata alam Hutan Mangrove, 4) Desa Tanjung Punak terdapat DTW Pantai Tanjung Lapin, Mandi Safar, Tari Zapin Api, Hutan Mangrove, 5) Titi Akar terdapat DTW Kelenteng Cin Bu Kiong, Etnotourism Suku Akit, Sumur Bertuah, 6) Desa Hutan Ayu terdapat DTW Etnotourism Suku Akit, 7) Suka Damai terdapat DTW Pulau Beting Aceh, 8) Desa Puteri Sembilan terdapat DTW Makam Puteri Sembilan, Pantai Bestari

*Kedua*, permasalahan pengembangan Data Objek wisata Wisata Kecamatan Rupert Utara diatas terdapat banyak kendala dan permasalahan yang dialami. Dalam aspek wisata

bahari beberapa pantai mengalami abrasi. Abrasi yang terjadi di pulau rupaat di beberapa lokasi teluk rhu, putri sembilan, tanjung medang. Ketiga pantai tersebut terdampak abrasi parah dengan laju 2-7 meter per tahun. Permasalahan lain yang terjadi adalah belum ada pengelolaan sampah, sehingga banyak sampah bertebaran dipantai, dan dijalan. Akses air bersih juga menjadi kendala, beberapa lokasi belum disaluri air bersih. Pendukung lain seperti akses internet ketersediaan listrik yang tidak stabil banyak dikeluhkan wisatawan.

*Ketiga*, penulis menyimpulkan bahwa *collaborative governance* dilaksanakan dalam bentuk Keterlibatan berprinsip (*principled engagement*) dalam proses pengembangan objek wisata di pantai tanjung lapin, Motivasi bersama (*Shared Motivation*) dalam proses pengembangan objek wisata di pantai tanjung lapin perlu membangun rasa kepercayaan, Kapasitas untuk aksi bersama (*Capacity for Join action*) dalam proses pengembangan objek wisata di pantai tanjung lapin dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata masyarakat memiliki peran penting agar pengelolaan bisa berjalan dengan baik.

*Keempat*, Belum terpenuhi Sumber Daya Manusia yang berkualitas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan objek wisata di Rupaat Utara. Sarana dan prasarana belum memenuhi, dan juga belum terjalin kerjasama multisektor.

## REFERENSI

- Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Duran, C. (2013), "Governance for the tourism sector and its measurement", Issue Paper Series STSA/IP/ 2013/01, UNWTO Statistics and TSA, Madrid, October 2013
- Emerson, K., Nabatchi, T. and Balogh, S. (2011), "An integrative framework for collaborative governance", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 22 No. 1, pp. 1-29.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Lokantara, I Gede Wyana, Rafi'I Muhammad. 2017. Identifikasi Tipologi Destinasi Wisata Dan Strategi Pengembangannya Sebagai Upaya Mewujudkan Pariwisata Kabupaten Karangasem Berbasis Wisata Konservasi. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & call For Papers Unisbank Ke-3 (Sendi\_U 3) 2017*. ISBN:9-7-89-7936-499-93
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung: Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah.(2011). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 2025*. Jakarta

- Peraturan Pemerintah. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Pujiono, Bambang dkk. (2019). *Stakeholder Analysis on Tourism Collaborative Governance in Tanjung Lesung Tourism, Pandeglang Regency, Banten Province, Indonesia*. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 8 (3) - (2019) ISSN: 2223-814X
- Puteri, J., Harto, S., & Adianto, A. (2022). *Pengembangan Pariwisata Di Rupa Utara Dalam Perspektif Sustainable Tourism*. Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 5(1), 55-73. <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1466>
- Rheza, Muhammad, & Zaili Rusli. 2019. *Pengembangan Kawasan Wisata Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis*. JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari-Juni 2019
- Sugiyono.(2006).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta
- Syahrial dkk. 2021. *Karakteristik ekologi, kondisi kesehatan dan tingkat kerawanan degradasi mangrove saat penginisiasian KKPD Rupa Utara 2018*. Dinamika Lingkungan Indonesia, Januari 2021. Volume 8, Nomor 1. DOI 10.31258/dli.8.1.p.1-10